

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) sebagai Salah  
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :  
**FATMA RIZA MULIA**  
2020/20133029

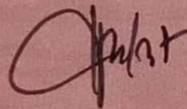
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

Nama : Fatma Riza Mulia  
NIM/BP : 20133029/2020  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

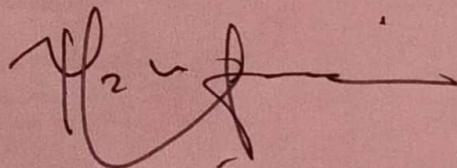
Diketahui Oleh,  
Koordinator Program Studi  
DIII Akuntansi



Mayar Afriventi, SE, M. Sc  
NIP.198401132009122005

Padang, November 2023

Diketahui Oleh,  
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM. Ak.CA  
NIP.198008092010121003

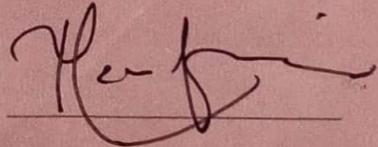
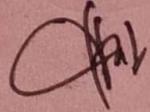
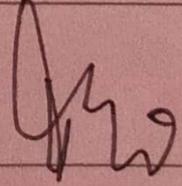
## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Fatma Riza Mulia  
NIM/BP : 20133029/2020  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Tim Penguji Tugas Akhir  
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang

Padang, November 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Halkadri Fitra, SE, MM. Ak, CA	(Ketua)	
Mayar Afriyenti, SE, M. Sc	(Anggota)	
Jefriyanto, M.Ak	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang telah bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatma Riza Mulia  
Thn. Masuk/NIM : 2020/20133029  
Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi/06 Januari 2002  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jorong Baringin, Nagari Batu Taba  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Karya ilmiah ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya yang sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2023  
Yang Menyatakan,



Fatma Riza Mulia  
NIM.20133029

## ABSTRAK

**Fatma Riza Mulia : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat**  
**Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, AC**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan, tingkat efektivitas pendapatan asli daerah, tingkat efisiensi dalam memperoleh pendapatan asli daerah, tingkat derajat desentralisasi keuangan, tingkat ketergantungan keuangan pada Pemerintah Kota di provinsi Sumatera Barat pada periode tahun 2017-2021.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran pada setiap kota di Provinsi Sumatera Barat, dan data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat berdasarkan 1) Rasio Kemandirian Keuangan dari tahun 2017-2021 untuk tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata sebesar 15.88%. 2) Rasio efektivitas PAD dari tahun 2017-2021 untuk tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata sebesar 90.97%. 3) Rasio Efisiensi dalam memperoleh PAD dari tahun 2017-2021 untuk tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata sebesar 98.92%. 4) Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan dari tahun 2017-2021 untuk tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata sebesar 12.26%. 5) Rasio Ketergantungan Keuangan dari tahun 2017-2021 untuk tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata sebesar 85.20%.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio efektivitas PAD, Rasio Efisiensi dalam memperoleh PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun ”**.

Penulisan Tugas Akhir ini di susun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan ,dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak.

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE M.Sc,Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc. Selaku Ketua Prodi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5. Ibu Helina Helmy, SE, Akt., M. S.Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff pegawai, yang telah mendidik peneliti selama menjalani pendidikan di Prodi Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Padang.

7. Ibu Endra Murni, yang tiada hentikan memberikan kasih sayang, mendoakan, memberi semangat, motivasi dan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
8. Abang dan kakak serta keluarga besar, yang selalu mendoakan, membantu finansial penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis Mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Padang, Agustus 2023

Fatma Riza Mulia

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Laporan Keuangan Daerah .....	10
B. Keuangan Daerah .....	15
C. Kinerja Keuangan Daerah .....	19
D. Analisis Kinerja Keuangan Daerah .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Bentuk Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
C. Rancangan Penelitian .....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran umum .....	32
1. Sejarah BPK Provinsi Sumatera Barat .....	32
B. Pembahasan .....	33
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 2. 2. Skala Interval Efektivitas .....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 2. 3. Skala Interval Efisiensi .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2. 4. Skala Interval Derajat Desentralisasi.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2. 5. Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3. 1. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah.....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 3. 2. Skala Interval Efektivitas .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 3. 3. Skala Interval Efisiensi .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3. 4. Skala Interval Derajat Desentralisasi.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3. 5. Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4. 1. Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 4. 2. Analisis Rasio Kemandirian.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4. 3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 4. 4. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4. 5. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4. 6. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4. 7. Derajat Desentralisasi Tahun Anggaran 2017-2021 .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4. 8. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 4. 9. Tingkat Rasio Ketergantungan Anggaran Tahun 2017-2021 .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4. 10. Analisis Rasio Ketergantungan.....</b>	<b>58</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut. Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 mengenai Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi

pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi (Nurabiah, 2018).

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Mahmudi (2013) laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja di dalamnya. Laporan pemerintah daerah perlu ditingkatkan kualitasnya agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dan merugikan pihak-pihak yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan

menunjukkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan daerah. Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim,2014). Dengan adanya rasio keuangan daerah dapat dilihat bahwa hubungan kemampuan keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat akan tercermin pada indeks pembangunan manusia.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan (wonda,2016).

Hasil rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlakukan daerah (Abdul Halim,2013). Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Abdul Halim, 2013). Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Rasio Derajat Desentralisasi melihat kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah, sehingga makin besar persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan maka semakin baik, artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah yang

meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halkadri,2019). Rasio Ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total dengan penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Halkadri,2019).

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Provinsi Sumatera Barat yang akan diteliti kinerja keuangannya. Hal ini karena, provinsi yang dikukuhkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang juga menjalankan otonomi daerah.

Provinsi Sumatera Barat memiliki hak dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk lebih mampu dalam memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki daerahnya, sehingga permasalahan berangsur-angsur teratasi. Selaku Pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Sumatera Barat dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan daerah sesuai dengan tugas pemerintah yaitu melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan) dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan, namun meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah, kita hanya dapat melihat keadaan atau kondisi keuangan suatu daerah tersebut dalam jumlah rupiah saja, namun belum mampu menunjukkan kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan, apakah rasio tersebut mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efesiensi, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah pada

Pemerintah Kota di Sumatera Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017-2021 menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio Efisiensi Keuangan Daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota di Sumatera Barat, sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatera Barat”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan suatu masalah, yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat jika diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Dtahun 2017-2021?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat jika diukur dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat jika diukur dengan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun 2017-2021?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat jika diukur dengan Rasio Derajat Desentralisasi tahun 2017-2021?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota di Sumatera Barat jika diukur dengan Rasio Ketergantungan Keuangan daerah tahun 2017-2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan daerah tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun 2017-2021.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi tahun 2017-2021.
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tahun 2017-2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berarti bagi pihak yaitu :

1. Pihak Peneliti
  - a. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di Universitas.

b. Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasanpenelitimengenaicaramenganalisiskinerjakeuangaerakhusnyamengenaikinerjakeuangaerahpemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Serta dapat dijadikan perbandingan dalam menilai kinerja keuangan dengan setiap Kabupaten/Kota yang lainnya.

## 3. Bagi Universitas

Sebagai bahan perpustakaan yang dapat digunakan para mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dalam mempelajari pembuatan tugas akhir, khususnya dalam bidang menganalisis laporan keuangan.